

Determinan terjadinya Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa

(Studi pada Pemerintah Desa Kabupaten Semarang)

Emy Widyastuti¹, Dwi Noviana Sari²

Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN Salatiga

*Corresponding author*¹ emywidyastuti@iainsalatiga.ac.id

Abstract

As an institution that serves the community, the village government is obliged to account for the state finances it manages. However, based on the data, many fraudulent practices still occur in the village administration. This study was conducted to determine the factors that influence the occurrence of fraud in managing village government funds. Data analysis was performed through multiple linear regression. Research data in the form of primary data through a questionnaire instrument with convenience sampling as the technique used in the research sample. Partially, the results show that the variables of the presentation of village financial statements and internal control do not affect the occurrence of fraud. Meanwhile, organizational ethical culture and religiosity have a negative effect on the occurrence of fraud.

Keywords: *Fraud, presentation of village financial reports, internal control, organizational ethical culture, religiosity*

Abstrak

Sebagai sebuah lembaga yang melayani masyarakat, pemerintah desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelolanya. Namun berdasarkan data, masih banyak ditemui praktik kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana pemerintahan desa. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda. Data penelitian berupa data primer melalui instrumen kuisisioner dengan *convenience sampling* sebagai teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian. Secara parsial hasilnya menunjukkan variabel penyajian laporan keuangan desa dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Sedangkan budaya etis organisasi dan religiusitas berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*).

Kata Kunci : *Fraud, penyajian laporan keuangan desa, pengendalian internal, budaya etis organisasi, religiusitas*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan lembaga yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengatur dan memastikan suatu sistem dalam negara berjalan dengan baik. Salah satunya dalam hal tata kelola keuangan negara. Namun masih banyak terjadi praktik-praktik *fraud* terutama korupsi dalam sektor pemerintahan yang ditemukan di dalamnya. Rilis data *Indonesian Corruption Watch (ICW)* tahun 2020 mencatat terdapat 129 kasus pada sektor anggaran desa. Pada periode yang sama sektor pemerintahan tercatat ada 40 kasus, sektor transportasi sebanyak 29 kasus, sektor perbankan 26 kasus, pendidikan dan pertahanan masing-masing 25 kasus, sektor kesehatan sebesar 16 kasus dan pada sektor pajak sebanyak 15 kasus korupsi yang ditemukan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa anggaran desa merupakan sektor yang sering terjadi perkara tindak korupsi. Tren kasus korupsi selama 5 tahun berdasarkan temuan ICW disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Data kasus korupsi sektor anggaran desa

Berdasarkan data yang diterbitkan ICW (Gambar 1.) menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir kasus korupsi pada sektor anggaran desa cenderung mengalami kenaikan. Negara tercatat mengalami kerugian senilai Rp 50,1 miliar pada tahun 2020 dari 129 kasus yang terjadi. Pada periode sebelumnya hanya ada 48 kasus. Begitupun dengan jumlah kepala desa dan aparatur desa yang terjerat juga ikut naik. Tercatat di tahun 2019 sebanyak 45 kepala desa dan 19 aparatur desa terlibat kasus korupsi. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2020 menjadi 132 kepala desa dan 50 aparatur desa. Untuk menghindari peristiwa *fraud* yang merugikan keuangan negara tersebut, maka sangat penting untuk melakukan pencegahan dan menekan kemungkinan tindak *fraud*.

Upaya pencegahan *fraud* perlu dilakukan dengan menyajikan sebuah laporan keuangan yang transparan dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010. Upaya perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan desa akan mencegah terjadinya praktik kecurangan. Oleh sebab itu pemerintahan desa perlu memiliki aparat yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan sehingga mampu untuk menyajikan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Pengendalian intern dibutuhkan organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pengendalian intern yang efektif dapat menjadi kekuatan organisasi dalam menghadapi setiap tantangan serta membantu organisasi dalam mencegah atau mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*). Tindakan kecurangan atau *fraud* juga dipengaruhi oleh budaya etis organisasi. Hal ini berarti perilaku individu dilatarbelakangi oleh budaya yang menjadi kebiasaan di lingkungan organisasi tersebut. Dengan menanamkan budaya yang etis dalam organisasi maka dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan tujuan dari organisasi.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi perilaku kecurangan adalah tingkat religiusitas. Di Indonesia religiusitas sangat erat hubungannya dengan ilmu agama dimana diyakini bahwa agama menjadi benteng kuat dalam menghindari perilaku yang menyimpang seperti kecurangan (*fraud*). Segala bentuk tindakan umat Muslim akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Hal ini mendorong seorang Muslim harus berperilaku sesuai tuntunan agama dan tidak melakukan kecurangan, dimana salah satunya harus menyampaikan amanah dengan sebaik-baiknya sebagaimana disampaikan dalam Q.S An-Nisa ayat 58. Dengan demikian, seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi cenderung akan memiliki pemahaman serta melakukan pengamalan sesuai dengan tuntunan agamanya dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai latar belakang di atas serta adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan, pengendalian internal, budaya etis organisasi dan religiusitas terhadap kecurangan (*fraud*). Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

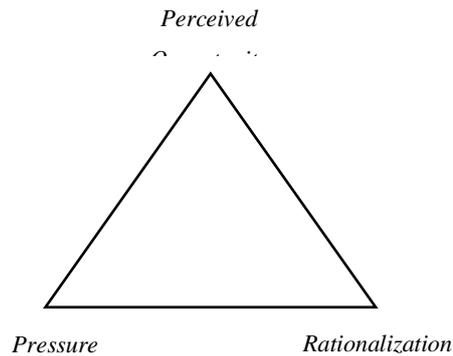
Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*)

Ajzen (1991) menjelaskan kerangka teoritis mengenai perilaku manusia dalam “*The theory of planned behavior*”. Teori ini menjadi penyempurna dari teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) yang telah diperkenalkan sebelumnya. Sama halnya dengan teori tindakan beralasan, dalam teori perilaku terencana niat atau keinginan menjadi faktor mendasar yang mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan individu. Selama individu memiliki niat atau keinginan yang kuat dalam melakukan suatu perilaku tertentu, selama itu pula individu akan terus berupaya untuk mencapai apa yang akan mereka lakukan.

Ajzen menjelaskan dalam teori tindakan beralasan, niat atau keinginan dalam melakukan sebuah perilaku akan dipengaruhi oleh dua faktor. Dua faktor yang terkait yaitu *attitude toward the behavior* atau diartikan dengan sikap terhadap perilaku dan *subjective norm* atau norma subjektif. Dua faktor tersebut dianggap tidak memperjelas perilaku yang dapat sepenuhnya dikontrol oleh individu sekalipun perilaku yang dikehendaki tersebut memiliki pandangan yang positif. Dalam teori perilaku terencana ditambahkan satu faktor penentu perilaku yaitu *perceived behavioral control* atau kontrol perilaku yang dipersepsikan dimana *perceived behavioral control* memegang peranan penting dalam *theory of planned behavior* karena berada di antara *intention* dan *behavior* yang menjadi penentu keberhasilan seseorang dalam berperilaku.

Fraud triangle theory

Fraud triangle theory ialah salah satu teori kecurangan yang dicetuskan oleh Donald R. Cressey yang menjelaskan mengenai faktor pendorong tindakan *fraud* yang digambarkan dalam segitiga *fraud*, seperti terlihat dibawah ini (Tuanakotta, 2010). Segitiga *fraud* disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Fraud triangle

Berdasarkan Gambar 2., diketahui sudut pertama dari segitiga *fraud* adalah *pressure*. *Pressure* merupakan tekanan yang dirasakan yang dapat memicu munculnya tindakan tidak etis seperti *fraud*. Tekanan tersebut dapat berupa tekanan finansial maupun non finansial. Selanjutnya sudut kedua adalah *perceived opportunity*. *Perceived opportunity* atau peluang tercipta karena tata kelola yang tidak efektif yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan *fraud*. Lemahnya pengendalian internal dan sistem organisasi justru menguntungkan bagi pelaku *fraud* karena keadaan tersebut memiliki risiko *fraud* tidak terdeteksi. Sudut ketiga, *rationalization* (rasionalisasi). Rasionalisasi adalah pembenaran atas perilaku curang. Tindakan yang mengarah ke perilaku kecurangan dipengaruhi oleh nilai-nilai etika dan penalaran moral pegawai.

Kecurangan (*fraud*)

Fraud merupakan perbuatan curang yang dikerjakan secara sengaja baik oleh individu maupun kelompok dan dilakukan dalam lingkup ataupun luar organisasi dengan maksud mendapatkan keuntungan (Arthana, 2019). Kecurangan merupakan bagian dari tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sadar dan berakibat pada kerugian pihak lain demi kepentingannya sendiri. Semakin maraknya tindak *fraud*, tentu saja akan membuat lingkungan menjadi tidak kondusif. Di Indonesia istilah *fraud* identik dengan korupsi atau penggelapan uang. Meskipun sebenarnya korupsi termasuk bagian dari tiga bentuk *fraud*. Organisasi internasional *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasi *fraud* dalam bentuk *fraud tree* atau korupsi (*corruption*), penyelewengan aset (*asset misappropriation*), dan manipulasi laporan keuangan (*fraudulent statements*) (Tuanakotta, 2010).

Korupsi (*corruption*) adalah tindakan penipuan oleh seseorang atau sejumlah orang dengan memanfaatkan wewenangnya demi kepentingannya sendiri yang berakibat merugikan pihak lain. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan penyelewengan terhadap aset perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi. Manipulasi laporan keuangan (*fraudulent Statements*) adalah bentuk penyimpangan terhadap laporan keuangan yang memberikan keuntungan bagi pelakunya. Dua jenis *fraudulent statements* yang dapat dilakukan yaitu *financial* dan *non financial*.

Penyajian laporan keuangan desa

Aktivitas pengungkapan dan penyajian laporan keuangan mengacu pada catatan terstruktur yang disusun sesuai dengan aturan atau standar yang termuat dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang berisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dimana mengharuskan penyusunan sistem akuntansi harus memiliki ciri relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Oleh sebab itu pada sektor pemerintahan penyajian laporan keuangan membutuhkan aparatur yang kompeten dan memahami sistem akuntansi.

Laporan keuangan desa disusun sebagai bentuk tanggungjawab pemerintahan desa kepada pemerintahan di atasnya maupun kepada publik atau masyarakat atas pelaksanaannya dalam mengelola sumber daya yang ada dan berguna sebagai alat evaluasi kepala desa atau pihak lain yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Permendagri 113 Tahun 2014 tersebut digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan sesuai anggaran. Ramadani (2020) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan yang berkualitas mempunyai fungsi dalam pencegahan *fraud*. Utami et al., (2019) menegaskan hal yang sama bahwa pemerintahan desa dengan keterlibatan SDM yang berkualitas dapat menghasilkan laporan keuangan yang memadai sehingga dapat mencegah kecurangan.

Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah sistem yang didukung oleh manajemen, dewan direksi atau pekerja lainnya yang dirancang untuk menjamin tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian intern dilakukan melalui penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya, operasional perusahaan yang efektif efisien, serta taat terhadap setiap aturan dan undang-undang yang berlaku (Susanto, 2008).

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 terdapat lima komponen pengendalian intern yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan dan standar pengujian efektivitas penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian organisasi, evaluasi risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi serta tahap monitoring menjadi aspek penting dalam pengendalian intern. Arthana (2019) dan Wijayanti & Hanafi (2018) berkesimpulan bahwa efektifitas pengendalian intern memiliki pengaruh yang negatif pada potensi terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Jika pengendalian internal dalam pemerintahan desa dilakukan secara efektif maka akan mengurangi potensi terjadinya kecurangan (*fraud*).

Budaya Etis Organisasi

Artini, Adiputra & Herawati (2014) mendefinisikan budaya etis organisasi merupakan seperangkat sistem norma, nilai, dan keyakinan yang menjadi karakteristik setiap anggota lembaga. Budaya berpengaruh terhadap cara kerja serta tingkah laku setiap anggota organisasi sehingga membentuk kebiasaan atau tradisi organisasi yang baik dan bermoral serta mengendalikan perilaku yang merusak nama baik organisasi. Untuk menciptakan lingkungan organisasi dengan budaya yang lebih etis atau baik, dapat mengikuti prinsip model sikap perilaku manajemen puncak (*top management*). Perilaku manajemen puncak dijadikan panutan oleh para karyawan dalam berperilaku dan bertindak, komunikasi harapan-harapan etis untuk memperkecil ambiguitas etika. Menurut Adi, Ardiyani & Ardianingsih (2016) budaya etis dalam suatu organisasi mendorong terjadinya kecurangan. Artini, Adiputra & Herawati (2014) melaporkan temuan serupa, mengklaim bahwa budaya etis organisasi berdampak pada kecurangan akuntansi. Penerapan budaya perusahaan yang positif akan menstimulus setiap anggota organisasi untuk berperilaku etis agar terhindar dari kecurangan akuntansi.

Religiusitas

Religiusitas berarti seberapa dalam pemahaman, seberapa kuat kepercayaan, serta seberapa pengamalan ibadah yang ditunjukkan dan dihayati oleh individu sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai bentuk perwujudan beribadah. Dalam pandangan Islam religiusitas didefinisikan suatu ikatan personal manusia dengan Sang Pencipta, dimana di dalamnya terdapat pola yang mengendalikan perilaku manusia dalam kehidupannya sehingga tidak terjadi kekacauan dalam pemujaan kepada Allah SWT (Siswanto, 2007 dalam Egita & Mahfiroh, 2018). Sederhananya religiusitas dapat diartikan tingkat kepercayaan seseorang yang beragama terhadap Tuhannya. Terdapat lima dimensi dalam mengukur religiusitas seseorang yaitu keyakinan yang dimiliki, praktik agama, pengalaman, pengetahuan dan pengamalan agama yang dilakukan (Ancok dan Suroso, 2001). Menurut Egita & Mahfiroh (2018), religiusitas memiliki pengaruh negatif yang kuat terhadap terjadinya *fraud* dan menyimpulkan bahwa jika makin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin rendah risiko kecurangannya, dan sebaliknya. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi percaya bahwa setiap tindakan yang dilakukannya akan dibalas oleh Sang Pencipta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis dari penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 209 perangkat atau aparatur desa yang berasal dari 17 desa di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dan dipilih berdasarkan perangkat desa yang bersedia menjadi responden. Rumus Slovin digunakan untuk menghitung banyaknya sampel penelitian, yang mencakup 68 perangkat desa dari 17 desa. Instrumen penelitian berupa kuisioner yang disebarkan bertujuan untuk memperoleh data primer dari responden yang menjadi sampel penelitian.

HASIL PENELITIAN

Uji instrumen penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada 30 responden sehingga dapat diketahui apakah instrumen yang akan digunakan untuk memperoleh data penelitian valid dan reliabel. Tahap pengujian awal dilakukan untuk mengetahui validitas instrumen penelitian berupa kuisisioner. Dari keseluruhan item pertanyaan dalam kuisisioner diperoleh angka r hitung $>$ r tabel atau r hitung memiliki nilai lebih dari r tabel yang sebesar 0,2387 sehingga semua item pertanyaan kuisisioner dinyatakan valid.

Uji reliabilitas yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa keseluruhan variabel baik dependen maupun independen memiliki angka koefisien *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 (*Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60) sehingga semua item pertanyaan yang digunakan reliabel.

Model regresi harus diuji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Hasil uji asumsi klasi disajikan pada Tabel 1 – 3.

Tabel 1. Hasil uji heterokedastisitas

Variabel	t	Sig
Penyajian Laporan Keuangan	0,313	0,756
Pengendalian Internal	1,702	0,094
Budaya Etis Organisasi	-1,562	0,123
Religiusitas	0,898	0,373

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 2. Hasil uji normalitas

	Unstandardized Residual
N	68
Test Statistic	0,093
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF
Penyajian Laporan Keuangan	2,259
Pengendalian Internal	2,262
Budaya Etis Organisasi	1,761
Religiusitas	1,103

Sumber: data diolah, 2022

Hasil signifikansi seluruh variabel yang bernilai > 0,05 yang ditunjukkan oleh Tabel 1 menyimpulkan bahwa model regresi layak dan dapat digunakan untuk pengujian berikutnya. Pengujian normalitas melalui One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Tabel 2) menunjukkan bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 0,200 > 0,05 artinya residual dinyatakan berdistribusi normal. Tidak terjadinya korelasi antar variabel bebas ditunjukkan dari tabel 3 yang memperlihatkan nilai VIF < 10 dengan nilai *tolerance* > 0,1.

Hasil uji regresi linier berganda disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji regresi linear berganda

Variabel	B
(Constant)	6,336
Penyajian Laporan Keuangan	-0,007
Pengendalian Internal	-0,019
Budaya Etis Organisasi	-0,029
Religiusitas	-0,046

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4, dapat dirumuskan model persamaan (1).

$$\ln Y = 6,336 - 0,007 X_1 - 0,019 X_2 - 0,029 X_3 - 0,046 X_4 + e \dots\dots\dots(1)$$

Pengujian kelayakan model dan pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 5 – 7.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,655	0,429	0,392

Sumber: data diolah, 2022

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3.267	4	0,817	11,821	0,000
Residual	4.353	63	0,069		
Total	7.620	67			

Sumber: data diolah, 2022

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	Sig.
Penyajian Laporan Keuangan	0,610
Pengendalian Internal	0,069
Budaya Etis Organisasi	0,022
Religiusitas	0,009

Sumber: data diolah, 2022

Koefisien determinasi sebagai pengukur model dan besarnya kontribusi varian variabel mencerminkan seberapa mampukah variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,392 atau 39,2%. Diartikan variasi kecurangan (*fraud*) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini sedangkan sisanya sebesar 60,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Uji simultan penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) (Tabel 6). Hal ini mempertegas bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan desa, pengendalian internal, budaya etis organisasi dan religiusitas terhadap kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa faktor penyajian laporan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) (nilai signifikansi $0,610 > 0,05$). Faktor pengendalian intern juga tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) (nilai signifikansi $0,069 > 0,05$). Faktor budaya etis organisasi dan religiusitas berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) (nilai signifikansi $< 0,05$).

PEMBAHASAN

Pengaruh penyajian laporan keuangan desa terhadap kecurangan (*fraud*)

Berdasarkan uji statistik t variabel penyajian laporan keuangan desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*) di Pemerintahan Desa di Kecamatan Suruh. Pemerintah desa menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, perangkat atau aparatur desa membutuhkan kompetensi yang memadai sehingga berkompeten untuk menyajikan laporan keuangan desa sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010. Temuan penelitian ini berbeda dengan Ramadani (2020) dan Utami, Sarwono & Astuti (2019) yang menemukan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah desa berdampak pada terjadinya kecurangan. Rahimah, Murni & Lysandra (2018) mendapatkan temuan lain, menyatakan bahwa ketika pemerintah desa menyajikan laporan keuangannya, penyajian tersebut tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian statistik t menunjukkan variabel pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kecurangan di Pemerintahan Desa, Kecamatan Suruh. *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa niat atau keinginan merupakan faktor utama dalam berperilaku. Tekanan atau *pressure* memicu munculnya niat atau keinginan individu dalam bertindak curang. Persoalan finansial pribadi merupakan salah *pressure* yang paling kuat yang tidak banyak orang lain tahu dan biasanya diselesaikan secara sembunyi yang pada akhirnya memperkuat niat seseorang dalam melakukan perilaku *fraud*. Penelitian Arthana (2019) dan Wijayanti & Hanafi (2018) menyatakan bahwa terjadinya kecurangan (*fraud*) akan dipengaruhi oleh pengendalian internal yang dimiliki lembaga. Temuan penelitian ini serupa dengan hasil penelitian S. Setiawan (2018) bahwa bahwa pengendalian internal mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian statistik t menyatakan variabel budaya etis organisasi secara parsial berpengaruh terhadap kecurangan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Suruh. Budaya organisasi lebih mengarah pada duplikasi atau kesesuaian. Saat berada di lingkungan yang lebih etis, anggota organisasi terdorong untuk mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan organisasi dan menghindari perbuatan kecurangan. Dengan menanamkan budaya yang etis di organisasi, akan mengarahkan setiap orang untuk beretika dalam berperilaku sehingga perilaku tidak etis seperti tindakan *fraud* dapat dihindari. Sari (2018) menyatakan bahwa terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam sebuah organisasi tidak dipengaruhi oleh budaya etis organisasi dalam organisasi tersebut. Sedangkan Adi, Ardiyani & Ardianingsih (2016) maupun Artini, Adiputra & Herawati (2014) mendapatkan temuan yang sama dengan penelitian ini bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Religiusitas terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian statistik t menunjukkan religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa keyakinan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Pengetahuan agama yang luas

menambah keyakinan seseorang untuk berperilaku. Ketika perilaku tersebut dianggap positif dan tidak dilarang agama maka akan dilakukan dengan penuh keyakinan, sebaliknya jika suatu perilaku dinilai negatif dan melanggar aturan agama maka akan dihindari. Seorang individu dengan religiusitasnya yang tinggi, cenderung memiliki pengendalian untuk mencegah perilaku menyimpang yang dilarang agama salah satunya tindakan kecurangan (*fraud*). Atikah (2017) menyimpulkan bahwa meski seseorang memiliki religiusitas yang baik ternyata tidak akan berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Temuan ini mendukung penelitian Egita & Mahfiroh (2018) yang menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

KESIMPULAN

Faktor penyajian laporan keuangan pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap praktik kecurangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Suruh. Temuan ini menunjukkan bahwa meski penyajian laporan keuangan desa dilakukan dengan baik dan berkualitas tetap tidak akan menghindari terjadinya kecurangan. Faktor pengendalian intern pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan di Pemerintahan Desa Kecamatan Suruh. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal yang memadai tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya praktikkecurangan di Pemerintahan Desa.

Faktor budaya etis organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan di Pemerintah Desa Kecamatan Suruh. Dengan budaya etis organisasi yang tinggi akan meminimalisir tingkat kecurangan di Pemerintahan Desa. Di Pemerintah Desa Kecamatan Suruh, faktor religiusitas berdpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan. Aparatur desa dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan menekan dan meminimalkan praktik kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis faktor-faktor penentu kecurangan (fraud) pada sektor pemerintahan (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arthana, I. K. (2019). Analisa faktor-faktor terjadinya kecurangan (fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal akuntansi: transparansi dan akuntabilitas*. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Artini, N. L. E. A., Adiputra, I. M. P., & Herawati, N. T. (2014). Pengaruh budaya etis organisasi dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi Program S1*.
- Atikah, E. D. (2017). *Persepsi aparaturn pemerintahan desa mengenai determinan pencegahan kecurangan (Studi empiris di Kabupaten Tegal)*. Universitas Negeri Semarang.
- Egita, E., & Mahfiroh, S. (2018). Pengaruh kesesuaian kompensasi, reward and punishment dan religiusitas terhadap fraud (Studi pada Karyawan BMT di Kabupaten Wonosobo). In *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta. In *Universitas Diponegoro Yogyakarta*.
- Herlyana, M. V., Sujana, E., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh religiusitas dan spiritualitas terhadap kecurangan akademik mahasiswa [Studi empiris pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja]. *Jurnal akuntansi Program S1*.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*.
- Ramadani, D. (2020). Pengaruh praktek akuntabilitas, moralitas dan penyajian laporan keuangan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Sari, R. N. (2018). Pengaruh budaya etis organisasi, penegakan hukum dan asimetri informasi terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi (fraud). *Journal of Chemical Information and Modeling*.

- Setiawan, S. (2018). The effect of internal control and individual morality on the tendency of accounting fraud. *Asia Pacific Fraud Journal*.
<https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.04>
- Susanto, A. (2008). Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. In *Sistem Informasi Akuntansi*.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif* (2 ed.).
- Utami, Zulaikah Dwi, Eddy, Sarwono Aris, & Saptantinah, Puji Astuti Dewi. (2019). Pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat terhadap potensi fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 239–247.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10587259808042420>
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.